

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa peran Amerika Serikat dalam dinamika politik Internasional sangat besar. Tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi pada konstelasi politik internasional maupun politik domestik sejumlah negara. Terlebih, didukung oleh kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang sangat kuat, Amerika Serikat memiliki *bergaining position* yang sangat baik dalam konstelasi politik Internasional.

Kondisi semacam ini sudah sering diperlihatkan dalam forum-forum Internasional, baik yang diprakarsai PBB maupun lembaga internasional lainnya. Salah satunya, pada awal masa kepemimpinan George Walker Bush, ketika Amerika Serikat menghendaki invasinya terhadap Afghanistan atas dasar upaya pemberantasan terorisme pasca “serangan terorisme yang dilakukan kelompok Al-Qaeda organisasi pimpinan Osama Bin Laden” atau yang lebih dikenal sebagai September 11, Black September, atau 9/11.

Invasi yang dibalut dengan isu perang terhadap terorisme ini, sebagai sebuah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah konstelasi politik internasional. Terbukti, hal tersebut langsung

berpengaruh terhadap perspektif keamanan global dan kawasan serta strategi pertahanan sejumlah negara di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Terlebih, Indonesia yang ketika itu dianggap sebagai "sarang terorisme" pasca tragedi Bom Bali yang dituding memiliki organisasi teroris seperti Jamaah Islamiyah (JI). Maka, dalam kehendak dan kampanye Amerika Serikat memerangi terorisme, pemerintah Indonesia secara langsung mengubah strategi pertahanan keamanannya, baik pada level isu maupun praktik, turut berupaya atau membantu Amerika Serikat dalam memerangi dan menumpas terosisme.

Berdasarkan uraian tersebut, skripsi ini akan mengangkat permasalahan tadi untuk dijadikan kajian skripsi yang berjudul "Pengaruh Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan George Walker Bush Terhadap Strategi Pertahanan Indonesia".

B. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan dari penulisan karya tulis dan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh politik luar negeri Amerika Serikat terhadap strategi pertahanan di Indonesia.

C. Latar Belakang

Pada tahun 2001 Amerika Serikat mengalami pergantian kepemimpinan setelah masa pemerintahan Bill Clinton digantikan oleh George Walker Bush. Dalam

masa kepemimpinan George Walker Bush ini Amerika Serikat mengalami perubahan gaya kepemimpinan (*leadership style*) sekaligus gaya politik (*political style*).

Gaya kepemimpinan dan corak politik Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Bill Clinton (1993-2001) yang sangat terkonsentrasi pada masalah-masalah ekonomi (*economy-minded*), demokratisasi, dan HAM dimana hal tersebut terangkum dalam kebijakan *enlargement and engagement*. Kemudian berubah menjadi sangat terkonsentrasi pada masalah-masalah pertahanan keamanan (*military-minded*). Hal ini tercermin dari pidato kemenangan (*victory speech*) George Walker Bush dalam pemilu Amerika Serikat pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa inti dari nilai-nilai Amerika Serikat (*core of American values*) adalah mewujudkan perdamaian dunia, artinya Amerika Serikat ingin menjadi negara pemangku perdamaian dunia atau sering juga disebut “polisi dunia” hal inilah kelak yang melandasi tiap langkah politik luar negeri Amerika Serikat pada masa George Walker Bush. Menurut Bush, “*The only force powerful enough to stop the rise of tyranny and terror, and replace hatred with hope, is the force of human freedom.*” Dengan demikian, kebijakan Amerika Serikat harus berperan sebagai aktor pencipta perdamaian (*peace maker*) yang bertujuan mengakhiri tirani dan teror di seluruh dunia.¹

¹ Leonard Hutabarat, “*Multilateraisme dan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat*”, di akses pada tanggal 15 Agustus 2009, (<http://yosua-manalu.blog.friendster.com/>).

Pernyataan dan sikap politik Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George Walker Bush tersebut menemukan momentumnya ketika peristiwa WTC atau 9/11 terjadi. Tragedi penabrakan gedung kembar WTC oleh pesawat bajakan yang terjadi selama dua jam ini dikenal sebagai “September Kelabu”, memakan kurang lebih 3.000 korban. Akibat serangan teroris tersebut, menurut Dana Yatim Piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, 189 orang tewas (termasuk para penumpang pesawat), 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania.²

Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok anggota Al-Qaeda yang merupakan organisasi pimpinan Osama Bin Laden dan juga sekaligus sebagai rezim yang berkuasa di Afghanistan. Di sinilah misi perang terhadap teroris sebagai pengganggu perdamaian dunia yang digembar-gemborkan pemerintahan George Walker Bush menemukan momentumnya. Pada gilirannya, sejak peristiwa memilukan tersebut George Walker Bush mulai memprakarsai perang terhadap terorisme bahkan dengan tegas menyatakan *“Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with terrorist”*. Dan perang dalam arti sesungguhnya segera menyusul pasca invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dengan dalih mencari Osama Bin Laden.

Sejak saat itulah semua aktor politik dunia baik itu negara maupun non negara turut terlibat dalam isu terorisme. Isu tersebut, dalam level Internasional, menjadi fokus perhatian utama seluruh negara di seluruh dunia. Dalam kerangka isu perang

² Kompas, 2 Oktober 2001

melawan terorisme, peristiwa 9/11 membuat Amerika Serikat secara otomatis mengubah sikap politiknya yang sebelumnya cenderung *defensive* (terutama pada masa Bill Clinton) berubah menjadi agresif dengan melalui kebijakan militer *preemptive attack* (serangan dini), dan melakukan tekanan politik terhadap pihak yang diduga sebagai kelompok teroris, sarang teroris, atau bahkan pihak yang dianggap mendukung gerakan terorisme.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang dikemukakan Presiden George Walker Bush pada bulan September 2002 di dalam dokumen berjudul “*The National Security Strategy for the United States of America*” yang memiliki 5 (lima) tema besar, yaitu: Pertama, *Promoting Human Dignity* (meningkatkan martabat manusia); Kedua, *Defeating Global Terrorism* (memberantas atau memerangi terorisme global); Ketiga, *Defusing Regional Conflict* (mengeliminir konflik-konflik regional); Keempat, *Preventing Proliferation of Weapon of Mass Destruction* (mencegah proliferasi senjata pemusnah massal); Kelima, *Promoting Global Economic Growth Through Free Markets and Free Trade* (meningkatkan pertumbuhan ekonomi global melalui pasar bebas dan perdagangan bebas).³ Tiga poin (kedua, tiga, dan empat) dari lima poin yang termuat dalam dokumen itu jelas menunjukkan sikap politik luar

³ *The National Security Strategy for the United States of America*, Diakses pada tanggal 1 September 2009;
(<http://www.whitehouse.gov/search/?keywords=the%20national%20security%20strategy%20of%20the%20united%20states%20of%20america>)

negeri Amerika Serikat yang terfokus dalam bidang pertahanan dan keamanan dunia terutama pada isu perang melawan terorisme.

Fokus politik luar negeri Amerika Serikat yang menyatakan perang melawan terorisme ditunjukkan secara langsung dengan invasi terhadap Afghanistan atas nama “perang melawan teroris”. Apa yang dilakukan Amerika Serikat tersebut mendapat dukungan dari seluruh mayoritas negara di dunia, sehingga secara tidak langsung memperoleh legitimasi dari PBB untuk menyerang Afghanistan. Hal ini, jika dilihat lebih dalam, inisiatif Amerika Serikat untuk menyerang Afghanistan menunjukkan satu bentuk kebijakan yang lebih bersifat unilateral dengan menempatkan terorisme sebagai agenda dan kepentingan bersama masyarakat Internasional dalam kepentingan nasional Amerika Serikat sendiri.

Setelah apa yang dilakukan Amerika Serikat di Afghanistan, misi mulia untuk menciptakan perdamaian di dunia berlanjut ke Irak. Kali ini Amerika Serikat menuduh Saddam Hussein (Irak) sebagai penjahat Internasional karena memiliki senjata pemusnah massal (*mass destructive weapon*), pelanggar HAM, dan pendukung gerakan teroris. Atas alasan itulah Amerika Serikat kemudian menginvasi Irak.

Di sinilah, jika mencermati kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pasca tragedi WTC dan Pentagon memang menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Dari orientasi politik luar negeri yang terfokus ke masalah ekonomi, demokratisasi, dan HAM (Bill Clinton) berubah menjadi oerientasi politik luar negeri

yang terfokus mengenai masalah keamanan dalam hal ini terorisme (George Walker Bush). Dengan hal ini Amerika Serikat berubah menjadi sangat represif dan reaktif terhadap negara-negara yang dianggap membahayakan bagi perdamaian dunia dan mengancam keamanan internasional. Atas nama gerakan anti terorisme, Amerika Serikat kerap kali menuduh, mencap dan menetapkan negara-negara tertentu sebagai musuh yang harus diperangi. Maka, tidak heran jika pada masa George Walker Bush, Amerika Serikat lebih mengedepankan kekuatan militernya sebagai alat diplomasi atau istilah ini sering disebut *hard power* yang identik dengan isu pertahanan dan keamanan.

Pada gilirannya, gaya politik luar negeri dan kebijakan-kebijakan baru tersebut berpengaruh pada kondisi politik internasional, di mana hampir setiap negara di dunia secara tiba-tiba turut serta menyatakan perang terhadap terorisme mendukung Amerika Serikat. Negara-negara kemudian merasa perlu menyesuaikan diri dengan perubahan gaya dan fokus politik luar negeri Amerika Serikat ini. Terutama negara-negara kawasan, seperti di kawasan Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura yang terlihat langsung mengeluarkan Undang-undang khusus mengenai Terorisme dalam kerangka *International Security Act (ISA)*. Di sini Indonesia secara tidak langsung mengikuti hal yang sama.

Bahkan sebagai salah satu negara dalam kawasan Asia Tenggara, Indonesia mengalami “serangan terorisme” yang diawali dengan serangan bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002, pemboman di depan hotel J.W. Marriott di Jakarta pada

bulan Agustus 2003, serangan bom di depan Kedutaan besar Australia di Jakarta pada bulan September tahun 2004, dan bom Bali II pada tanggal 1 Oktober 2005. Serangan terorisme tersebut sekaligus mengubah paradigma bahwa selama ini ancaman keamanan terbesar yang bersifat tradisional berupa “agresi dan invasi” dari negara lain dianggap sebagai ancaman yang dapat mengganggu eksistensi sebuah negara tergantikan oleh isu keamanan yang bersifat non tradisional berupa serangan teror.

Bergesernya paradigma ancaman keamanan dari yang tradisional ke yang non tradisional membuat negara-negara di dunia harus segera mengantisipasi ancaman keamanan seperti ini. Akan tetapi kondisi untuk “cepat tanggap” terhadap bergesernya ancaman keamanan tersebut tidak mampu segera diantisipasi semua negara, termasuk Indonesia. Indonesia ketika pada awal-awal tahun 2000-an tepatnya ketika sebelum peristiwa 9/11 terjadi, masih beranggapan bahwa ancaman keamanan yang paling membahayakan bagi Indonesia adalah ancaman dari luar (tradisional). Anggapan seperti ini diambil karena jauh sebelum tahun 2000-an atau sebelum peristiwa 9/11 terjadi, sedikit dipengaruhi oleh isu keamanan tradisional yang cukup menonjol, yakni yang berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi, khususnya pengaruh kekuatan blok barat dan blok timur. Pada masa itu, kekhawatiran dunia terutama pada masalah pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut Indonesia ketika itu di bawah pemerintahan Megawati dihadapkan pada permasalahan peremajaan peralatan militer. Bahkan

dalam perkembangannya Megawati mengeluarkan kebijakan pertahanan untuk membeli satu skuadron Sukhoi dari Russia.

Selain itu pemerintah Indonesia ketika itu pada Masa Transisi Demokrasi disibukkan dengan bagaimana menata ulang peran dan fungsi TNI-Polri. Dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang pertahanan kemandirian berupa; *Pertama*, Penataan kembali TNI sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi dan reaktualisasi peran TNI sebagai alat negara. *Kedua*, Pembangunan kemampuan sistem pertahanan rakyat semesta yang bertumpu kepada kekuatan rakyat dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lain dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri dan Rakyat. *Ketiga*, Peningkatan kualitas profesionalisme TNI, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta kekuatan pertahanan kemandirian negara kewilayahan yang didukung dengan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai. *Keempat*, Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang Hankam dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut berpartisipasi dalam upaya memelihara perdamaian dunia.⁴ Arah kebijakan pertahanan tersebut mengacu pada visi yang diharapkan yaitu terbangunnya institusi TNI yang solid dan mengedepankan profesionalisme sebagai pengawal kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Sementara itu dari kebijakan pertahanan tersebut tidak disinggung mengenai bahaya

⁴ Connie Rahakundini Bakrie, “*Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*”, Jakarta, YOI, 2007. Hal. 86.

ancaman keamanan yang bersifat non tradisional (Terorisme) yang dapat mengganggu keamanan negara.

Perubahan strategi dan kebijakan pertahanan keamanan Indonesia pasca-perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat inilah yang akan menjadi fokus kajian skripsi ini.

D. Pokok Permasalahn

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, penulis dapat menarik sebuah pokok permasalahan yakni: “Bagaimana pengaruh politik luar negeri Amerika Serikat pada masa George Walker Bush terhadap strategi pertahanan Indonesia?”

E. Kerangka Teori

Teori Sistem Dunia (*World System Theory*)

Teori sistem dunia merupakan sebuah evolusi dari teori pembangunan yang dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pada tahapan pertama teori sistem dunia berawal dari teori modernisasi yang selanjutnya berkembang menjadi teori *dependencia*. Teori *dependencia* ini menitikberatkan pada hubungan antara negara *central* dengan *peri-peri* (negara maju dengan negara pinggiran). Kemudian setelah itu lahir teori sistem dunia atau *world system theory*, di mana dalam teori ini beranggapan dunia ini bagaikan sebuah sistem yang mencakup seluruh negara di dunia.

Dalam teori sistem dunia menginginkan adanya bentuk hubungan yang terbagi ke dalam bentuk tiga negara yakni negara *central*, pinggiran atau *peri-peri*, dan semi pinggiran. Semua lapisan negara tersebut akan terbentuk menjadi sebuah hubungan yang harmonis dan bertujuan untuk menuju pada bentuk negara *central*. Artinya disini bahwa dunia sebagai sebuah sistem yang memiliki unit-unit sistem adalah negara-negara yang saling berhubungan satu sama lain atau *interdependence*. Dalam sebuah hubungan *interdependencia*, ada pihak *dependence* atau bergantung pada pihak lain dan ada pihak yang tidak bergantung pada pihak lain atau *interdependence* yang bersifat dominan dan mengendalikan.

Asumsi tersebut jika dilihat dari perspektif kekuatan dunia, hubungan antar negara sangat berkaitan. Seperti halnya ketika perang dingin berlangsung ke dua negara terpecah menjadi dua kekuatan atau yang disebut Bipolar antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Ketika itu terjadi penyesuaian sikap antar negara *dependence* dalam hal ini negara-negara berkembang dan negara-negara miskin dengan negara *interdependence* dalam hal ini Amerika Serikat dengan Uni Soviet.

Kemudian setelah perang dingin usai kekuatan dunia berubah menjadi Multipolar. Hal ini dilihat dari kemunculan China, Jepang, Inggris, dan Perancis sebagai kekuatan baru. Namun sebenarnya kekuatan dunia bukanlah bersifat Multipolar melainkan Unipolar yakni Amerika Serikat sebagai pemegang kendali. Hal ini dilihat dari peran Amerika Serikat beberapa tahun terakhir. Seperti ketika Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Bill Clinton yang gencar

mengkampanyekan perdagangan bebas atau *free market* dan penegakan HAM, negara-negara lain menyesuaikan seperti Amerika Serikat lakukan. Begitu juga dengan Amerika Serikat pada masa George Walker Bush yang mengkampanyekan perang melawan terorisme. Sehingga disini terjadi keterkaitan antar unit-unit dalam hal ini negara miskin dan negara berkembang dengan negara maju. Dimana jika satu unit berubah maka, unit sistem yang lain ikut berubah artinya jika negara maju menerapkan suatu kebijakan maka negara-negara lain (berkembang dan miskin) menyesuaikan dengan negara maju.

Sementara itu jika dilihat dari tipologi strategi politik luar negeri yang dibuat John Lovell, dengan melihat empat dimensi yang menghasilkan empat tipe strategi yakni konfrontatif, memimpin (*leadership*), akomodatif, konkordan.⁵ Dalam konteks pengaruh politik luar negeri Amerika Serikat pada masa George Walker Bush terhadap strategi pertahanan Indonesia, dari empat tipe strategi tersebut Indonesia lebih cenderung bersifat akomodatif karena memandang Amerika Serikat lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan Amerika Serikat dalam menerapkan strategi politik luar negerinya yang cenderung bersifat memimpin. Sikap Amerika Serikat tersebut didukung dengan kemampuannya sebagai negara maju.

⁵ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, Hal. 190.

Gambar. Tipologi Strategi Politik Luar Negeri

PENILAIAN TERHADAP STRATEGI LAWAN			
Mengancam		Mendukung	
PERKIRAAN			
KEMAMPUAN	Lebih Kuat	Konfrontasi	Memimpin
SENDIRI	Lebih Lemah	Akomodasi	Konkordasi

Perbedaan strategi yang diambil ke dua negara di mana Indonesia lebih cenderung bersifat akomodatif dengan melakukan penyesuaian, dan Amerika Serikat bersifat memimpin khususnya dalam kebijakan luar negeri melawan terorisme, merupakan bagian dari adanya hubungan struktural dalam politik internasional. Dalam hubungan ini ada semacam sublimasi kekuasaan terutama diantara negara maju, negara berkembang, dan negara miskin.

Disisi lain pilihan strategi yang diambil Indonesia sebagai negara berkembang dengan melakukan penyesuaian terhadap politik luar negeri Amerika Serikat sebagai negara maju lebih disebabkan kekuatan yang dimiliki negara maju itu sendiri. Sehingga membuat negara berkembang dan negara miskin tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti negara maju.

Asumsi ini dilihat dari tata dunia internasional yang sering kali mengalami perubahan ketika terjadi peristiwa penting dunia. Pada saat yang sama negara miskin

dan berkembang melakukan penyesuaian dengan negara maju. Seperti halnya terjadi perang dunia pertama maupun perang dunia kedua dinamakan era perang antara sekutu dengan komunis. Berakhirnya perang dunia ke dua pada tahun 1945, segera diikuti dengan era perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian ketika pada tahun 1989 tembok Berlin runtuh, masyarakat internasional melihatnya sebagai era pasca perang dingin dengan bergulirnya isu ekonomi dan HAM. Setelah itu muncul peristiwa runtuhnya WTC di New York pada tanggal 11 September akibat serangan teroris, peristiwa ini sekaligus mengakhiri era pasca perang dingin yang sekarang digantikan dengan perang melawan terorisme.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut jelas berpengaruh pada negara-negara yang ada di dunia terutama negara berkembang dan negara miskin. Dimana negara berkembang dan negara miskin senantiasa mengalami penyesuaian struktural (*structural adjustment*) yang diakibatkan berubahnya tatanan dunia internasional tersebut. Penyesuaian ini merupakan bagian dari sebuah proses atau *siklus and fall of great powers*, yang terjadi akibat adanya perubahan atau pergeseran dalam *relative distribution of power* diantara kekuatan-kekuatan dunia.⁶

Bergesernya kekuatan-kekuatan dunia dari Bipolar, Multipolar, ke Unipolar yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting dunia seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, hal ini lah yang mengakibatkan negara berkembang dan

⁶ Rizal Sukma, “*Dinamika Politik Global, Keamanan Internasional, Dan Peran Indonesia*”, Jakarta 30 Januari 2007, Disampaikan dalam seminar “Memaknai Peranan Indonesia Sebagai Anggota Tetap DK-PBB”

negara miskin melakukan penyesuaian. Begitu juga dengan Indonesia (negara berkembang) terutama ketika terjadi peristiwa runtuhnya WTC mulai melakukan penyesuaian terhadap Amerika Serikat (negara maju) untuk ikut berperang melawan terorisme yang berimplikasi pada berubahnya strategi pertahanan Indonesia. Penyesuaian tersebut dilakukan berupa pemikiran akan bahaya yang ditimbulkan oleh serangan terorisme yang dapat menimbulkan kerugian baik itu materiil maupun immateriil yang begitu besar.

F. Hipotesis

Dari uraian yang sudah dipaparkan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada masa George Walker Bush menyebabkan Indonesia melakukan perubahan strategi pertahanan Indonesia yaitu ikut berperang melawan aksi terorisme berupa :

1. Undang-undang anti terorisme (Perpu RI No.1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 tahun 2002).
2. Inpres No. 4 pada 22 Oktober 2002 (Pembentukan Pasukan Detasemen 88).

G. Metode Penulisan

Bentuk dari penulisan skripsi ini menggunakan dua metode penulisan skripsi, Pertama, deskripsi analitis dimana dalam metode ini merupakan prosedur pemecahan masalah dengan mendiskripsikan sumber permasalahan. Metode deskripsi analitis

menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis fenomena yang ada didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat aktual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tertentu, serta berusaha memecahkan masalah.

Kedua, penulis menggunakan metode historis analitis yakni metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah. dengan cara pengumpulan data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain. Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomparasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi masa yang akan datang.

Untuk mendukung penggunaan metode ini penulis menggunakan Library Research atau studi pustaka yang berfungsi sebagai pengumpulan data. Dalam penggunaan Library Research penulis lebih menekankan kepada pencarian data melalui buku, surat kabar, artikel jurnal, dan media lain yang relevan dengan menggunakan metode ini.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah jangkauan penelitian sangat diperlukan guna membatasi permasalahan yang akan diteliti. Sekaligus untuk mempermudah penulisan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan permasalahan yang sudah dipaparkan di dalam hipotesa dan latar belakang masalah. Mengingat tema penulisan kali ini sangat luas ruang lingkup pembahasannya penulis akan membahas, Pertama, strategi pertahanan Indonesia sebelum masa pemerintahan George Walker Bush. Kedua, strategi pertahanan Indonesia pada masa George Walker Bush khususnya pasca kejadian 11/9

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : PERGESERAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang misi Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap dunia Internasional yang terbagi ke dalam sub-sub bab yakni:

1. Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Bill Clinton (1993-2001)
2. Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa George Walker Bush (2001-2007)

BAB III : DINAMIKA STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA

Dalam bab ini akan mendeskripsikan dinamika strategi pertahanan Indonesia. Bagaimana strategi pertahanan Indonesia selalu merespon setiap perubahan negara super power yang mau tidak mau harus menghadapi kondisi ini dan melakukan sejumlah penyesuaian dalam bentuk strategi pertahanan.

BAB IV : PERUBAHAN STRATEGI PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA

Dalam bab ini akan mendeskripsikan mengenai perubahan strategi pertahanan Indonesia sebagai efek yang ditimbulkan dari fokus kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yaitu perang melawan terorisme.

BAB V : KESIMPULAN, Bab ini merupakan kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai upaya analisis yang dilakukan sejak bab awal hingga bab keempat.